

PERAN KELEMBAGAAN DALAM HUBUNGAN PATRON KLIEN PADA MASYARAKAT NELAYAN

**Tamjuddin
Zainur Hidayah**

**Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UT
tamjuddin@ecampus.ut.ac.id
zainur@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Patron klien merupakan hubungan yang banyak ditemui pada masyarakat subsistem baik pada kalangan tani dan juga nelayan. Hubungan ini kerap kali dikategorikan hubungan yang negative dimana pihak yang kuat (patron) bertindak tidak adil kepada pihak yang lemah (klien). Namun demikian, pada beberapa kasus hubungan patron klien berdampak positif bagi kedua pihak. Studi ini bertujuan untuk melihat peran kelembagaan pemerintah dalam kaitannya dalam hubungan patron klien pada masyarakat nelayan. Hasil studi yang dilakukan dengan metode kualitatif menggambarkan bahwa hubungan patron klien didorong upaya dari masyarakat subsistem yang dalam hal ini bertindak selaku klien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara patron menggambarkan para pemilik modal atau sumberdaya yang memberikan bantuan pada pihak klien. Keterikatan hubungan patron klien sangat tergantung pada seberapa besar ketergantungan pihak klien kepada patron. Sedangkan besarnya ketergantungan klien akan sangat tergantung pada alternative pemberi bantuan lain diluar pihak patron mereka saat ini. Peran lembaga pemerintah seperti koperasi nelayan, tempat pelelangan ikan dan lembaga-lembaga keuangan mikro dapat menjadi alternative lain bagi masyarakat subsistem untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian pada beberapa kondisi peran lembaga-lembaga ini tidak berjalan maksimal. Perilaku nelayan, keterbatasan informasi serta birokrasi yang kadang menyulitkan mendorong nelayan masih tetap terikat menjalin hubungan patron klien dan juga bank dobrak/subuh (lembaga pemberi pinjaman pada pagi hari).

Keywords: patron klien, subsistem, alternative sumberdaya

PENDAHULUAN

Pada saat ini kondisi sumberdaya laut menunjukkan kecenderungan yang terus memburuk. Perubahan kondisi perairan laut dunia ini juga tercermin dari jumlah kapal nelayan yang berlabuh atau bersandar yang terus turun dari tahun ketahun (FAO,2011) serta jumlah tangkapan yang menurun rata-rata sebesar -2,23% dari tahun 2001-2010 (FAO,2012). Salah satu faktor menurunnya sumberdaya perairan laut ini disebabkan oleh *over exploited* yang disebabkan oleh *over fishing*. Dahuri dan Anas (2012) menyatakan *Over fishing* dapat menyebabkan 1) hasil tangkapan ikan persatuan upaya (kapal ikan atau nelayan) semakin menurun, 2) rata-rata ukuran ikan yang tertangkap semakin mengecil, 3) daerah penangkapan ikan (fishing ground) semakin jauh dari pantai. Ini semua berdampak pada biaya melaut yang semakin meningkat dan akan menekan pendapatan nelayan. Tanpa pengelolaan yang baik sumberdaya alam perikanan yang pada dasarnya merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui akan menjadi

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui atau stok produksi ikan dilaut akan terkuras dan selanjutnya berdampak pada ambruknya usaha perikanan tangkap.

Sementara itu, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pada perairan wilayah laut Indonesia. Kondisi perairan laut Indonesia dibedakan berdasar 4 kondisi yaitu 1) *fully exploited*, 2) *overexploited*, 3) *moderate* dan 4) *uncertain*. Pada tahun 2011 total ikan hasil tangkapan dari seluruh perairan Indonesia mencapai 5,06 juta ton, atau sekitar 78% dari total potensi maksimum lestari (*MSY/maximum sustainable yield*) yaitu 6,5 juta ton per tahun. Sementara laju penangkapan ikan maksimum yang diijinkan adalah sebesar 80% dari MSY. Artinya ruang untuk peningkatan produksi perikanan di Indonesia hanya tersisa 2%. Namun demikian, pada perairan Indonesia selain permasalahan penangkapan yang mendekati MSY ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan laut juga diperparah oleh 1) cara-cara penangkapan yang merusak lingkungan seperti menggunakan bahan peledak, racun, serta alat tangkap yang dilarang, 2) pencurian ikan oleh nelayan asing, 3) pencemaran, 4) alih fungsi dan perusakan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biakan biota laut, dan 5) perubahan iklim global (Dahuri dan Anas, 2012).

Penurunan sumberdaya laut ini pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat nelayan Indonesia. Keterbatasan ketrampilan serta latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat nelayan sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya laut. Pada sisi lain sumberdaya laut tidak dapat dieksploitasi setiap hari, pada kondisi badai atau ombak yang tinggi nelayan tidak dapat menangkap ikan di laut. Pada kondisi ini nelayan menggantungkan hidupnya pada kelompok sosial yang lebih tinggi yaitu para pemilik modal. Perilaku ini disebut *safety first* yaitu mengutamakan menjaga kelangsungan hidup dengan berbagai upaya seperti meminjam atau meminta bantuan pihak lain, atau menjual barang berharga mereka (.....). Ketergantungan nelayan pada pemilik modal menjadi awal mulanya terbentuknya hubungan patron klien pada masyarakat nelayan.

Pada masyarakat Indonesia hubungan patron client dapat terjadi baik di desa maupun di perkotaan. Walaupun hubungan ini merupakan hubungan simbiosis namun dalam hubungan simbiosis juga dapat dibedakan menjadi 3 yaitu parasitisme, mutualisme, komensalisme. Pada hubungan patron client pekerja merasa hubungan yang dibangun merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan berbagai bantuan yang diberikan pemilik lahan. Walaupun adakalanya pola hubungan bersifat parasitisme dimana tuan tanah atau pemilik lahan dengan berbagai bantuan yang diberikan berupaya untuk memperoleh manfaat yang lebih dari bantuan yang diberikan. Namun pekerja tidak dapat memutuskan hubungan yang telah terjalin sebagai akibat keterikatan pada hutang piutang dan balas jasa. Kondisi ini menurut Scott (1972) disebabkan pola hubungan patron klien menyangkut tiga kategori (1) terdapat suatu ketimpangan (*inequality*) dalam pertukaran; (2) bersifat tatap muka; dan (3) bersifat luwes dan meluas. Sementara itu Legg dalam Kusnadi 2009 menyatakan pada dasarnya, hubungan patron-klien berkenaan dengan: (a) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama; (b) hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubungan pribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); (c) hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi dan .

Pola hubungan patron klien ada yang kuat bertahan lama dan lemah. Salah satu sebab melemahnya hubungan patron klien adalah konflik, misalnya di Jepang konflik antara tuan tanah dan para penyewa di dekat kota atau pusat industri tidak disebabkan oleh pindahnya tuan tanah ke kota dan berkurangnya perlindungan terhadap petani tetapi

oleh fakta bahwa kesempatan-kesempatan bekerja di pabrik telah menarik para buruh tani keluar dari sektor pertanian (Waswo dalam Rustinsyah 2011).

Dalam memelihara hubungan patron klien diperlukan syarat tertentu antara lain (1) adanya sesuatu yang diberikan satu pihak, baik berupa uang atau jasa, yang merupakan sesuatu yang berharga bagi pihak lain; (2) terjadi transaksi pemberian antara pihak satu dengan lainnya maka yang menerima mempunyai kewajiban untuk membalas; dan (3) dalam hubungan tersebut terdapat norma-norma yang mengatur, misalnya apabila seseorang telah menerima sesuatu dan tidak tahu membalas, maka dianggap ingkar janji (Ahimsa, 1996).

Untuk melihat terjadinya hubungan patron klien yang negative atau parasitiesme tidaklah mudah. Hubungan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan hubungan pertumbuhan produktivitas nelayan dengan nilai tukar yang diterimanya. Pada kondisi produktivitas yang terus meningkat seharusnya nilai tukar nelayan menjadi semakin tinggi. Namun tidak selamanya hal ini terjadi volume yang tinggi akan mendorong meningkatnya suplai (pasokan) dan bila kondisi ini tidak didukung meningkatnya permintaan maka cenderung akan menurunkan harga. Disamping itu perilaku patron juga akan berdampak pada besarnya nilai rupiah yang diterima nelayan. Total produktivitas nelayan baik perikanan tangkap maupun budidaya pada tahun 2009 sebesar 9,8 juta ton dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 20,7 juta ton. Namun peningkatan nilai tukar nelayan (NTN) hanya terjadi pada kurun waktu 2008 ke 2009 yang semula 101,9 menjadi 105,7. Dari tahun 2009 NTN nelayan cenderung menurun yaitu 105,7 tahun 2009 menjadi 102,7 ditahun 2014 (Sumber data KKP).

Berdasarkan kondisi ini ada ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga peningkatan produktivitas nelayan tidak secara signifikan mendorong peningkatan ekonomi mereka berdasarkan NTN yang mereka terima. Sementara itu dilihat dari kontribusi nilai tukar untuk sektor pertanian, kontribusi produk perikanan masih yang paling rendah dibandingkan produk-produk pertanian lainnya. Pada tahun 2007 kontribusi NTN perikanan hanya sebesar 9.62 jauh dibandingkan tanaman pangan sebesar 47,65 serta peternakan sebesar 12,28. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ekonomi bagi masyarakat yang bergerak dibidang perikanan lebih rendah dari pada produk pertanian lainnya.

Salah satu faktor yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat ekonomi nelayan dibandingkan petani adalah hubungan patron klien yang pada umumnya mengikat nelayan kecil. Seperti yang dinyatakan Maulana (2014) yang menyatakan ketidak seimbangan kekuatan dalam hubungan patron klien mendorong perilaku oportunitik dari sisi patron dengan melakukan monopoli jual beli ikan hasil nelayan. Kausar dan Zaman (2011) pada studi hubungan patron klien pada petani sawit menemukan bahwa pada hubungan patron-klien dimana pihak toke dengan kekuatan yang lebih superior melakukan transaksi jual beli yang tidak seimbang dengan menetapkan harga pembelian sesuai kemaunya tanpa mempertimbangkan asas keadilan. Kondisi ini seringkali merugikan pihak petani selaku pihak yang imperior. Namun studi Priyatna dan Sumartomo (2011) menemukan bahwa hubungan patron dan klien yang didasari atas rasa saling percaya serta mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang tinggi akan menekan sifat eksploitatif dari pihak yang superior kepada yang imperior. Hubungan seperti ini memberi dampak saling menguntungkan dalam bentuk yang berbeda dan resiprositas. Selain itu, dalam beberapa hal pihak klien masih mendapatkan kebebasan dalam memilih patron. Walaupun hubungan yang terjadi bersifat mengikat, namun tidak terlalu ketat. Berdasarkan paparan diatas, masalah yang akan dibahas pada studi ini adalah bagaimana

mengatasi ketergantungan masyarakat nelayan pada pemilik modal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil studi adalah untuk mengkaji peran kelembagaan sebagai alternatif penyedia sumberdaya dalam hubungan patron klien masyarakat nelayan.

PUSTAKA

Istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh” (Usman, 2004). Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan “bapak-anak buah”, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau *extended family*. Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis, dan pada dasarnya juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron (Scott, 1993).

Popkin (1979), pola hubungan patron-klien merupakan tindakan monopoli dan eksploitasi karena patron menghalangi kliennya berhubungan dengan pasar. Scott (1981) mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut.

1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.
2. Adanya hubungan Resiprositas. Hubungan resiprositas adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walupun dalam kadar yang tidak seimbang.
3. Hubungan Loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan.

Hubungan Personal. Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara *patron* dengan *client*, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja melainkan juga mengandung unsur perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi.

Pola hubungan patron klien ada yang kuat bertahan lama dan lemah. Salah satu sebab melemahnya hubungan patron klien adalah konflik, misalnya di Jepang konflik antara tuan tanah dan para penyewa di dekat kota atau pusat industri tidak disebabkan oleh pindahnya tuan tanah ke kota dan berkurangnya perlindungan terhadap petani tetapi oleh fakta bahwa kesempatan-kesempatan bekerja di pabrik telah menarik para buruh tani keluar dari sektor pertanian (Waswo 1977). Dalam memelihara hubungan patron klien diperlukan syarat tertentu antara lain (1) adanya sesuatu yang diberikan satu pihak, baik berupa uang atau jasa, yang merupakan sesuatu yang berharga bagi pihak lain; (2) terjadi transaksi pemberian antara pihak satu dengan lainnya maka yang menerima mempunyai kewajiban untuk membalas; dan (3) dalam hubungan tersebut terdapat norma-norma yang mengatur, misalnya apabila seseorang telah menerima sesuatu dan tidak tahu membalas, maka dianggap ingkar janji (Ahimsa 1996). Unsur penting dalam hubungan patron-klien adalah resiprositas yang diatur norma-norma tertentu. Norma-norma yang mengatur hubungan timbal balik adalah (1) orang seharusnya membantu mereka yang telah menolong; dan (2) jangan mengingkari mereka yang telah menolong (Gouldner 1960). Sementara itu Rustinsyah (2011) menyatakan hubungan patron klien antara petani dan tengkulak khususnya *bakul* umumnya kuat dan bertahan lama. Patron berusaha mempertahankan pola hubungan tersebut untuk menjaga eksistensinya dalam

menjalankan kegiatan ekonomi dan mendapat pasokan barang secara stabil. Klien mendapatkan modal atau *dimodali* berupa kredit barang kebutuhan hidup sehari-hari, sarana produksi, dan sebagainya. Klien juga merasa aman karena mendapatkan keamanan subsisten seperti mendapat kredit di saat krisis atau kelangkaan uang. Patron, khususnya pembeli hasil pertanian, mempunyai peran yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi pedesaan karena (a) memberikan modal, jaminan subsistensi ketika klien menghadapi krisis karena kegagalan panen, musim kering yang panjang, kebutuhan keluarga yang mendesak dan lain-lain; (b) membeli hasil pertanian; (c) menyediakan kebutuhan input-pertanian seperti pupuk

Pfeffer and Salancik (1978) menyatakan ketergantungan ini sebagai akibat dari kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya bagi organisasi serta keberadaan organisasi lain yang memerlukan sumberdaya tersebut. Sementara itu Blau (1964) dalam Pfeffer and Salancik (1978) menyebutkan 4 cara untuk tidak tergantung pada pihak lain yaitu 1) strategi dalam mengelola sumberdaya untuk mandiri, 2) terdapat penyedia sumberdaya lain yang dapat dikelola mandiri, 3) menggunakan kekuasaan untuk memaksa pihak lain menyediakan sumberdaya serta 4) mengurangi kebutuhan atas sumberdaya tersebut. Sementara itu, tingkat ketergantungan organisasi dengan organisasi lain juga ditentukan oleh 1) penting tidaknya sumber daya tersebut, 2) kelangkaan sumberdaya sebagai akibat dari ketersediaan dan tingkat pemakaian, dan 3) ada tidaknya alternatif serta konsentrasi kepemilikan sumberdaya. Ketiga faktor ini mengakibatkan semakin tingginya ketidakpastian tersedianya sumberdaya, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi.

Pola ketergantungan tidak hanya terjadi antar organisasi tetapi bisa didalam organisasi yaitu antar bagian. Ketidaksetaraan serta adanya diferensiasi dalam organisasi semakin meningkatkan kompleksitas, untuk itu diperlukan koordinasi dalam upaya mengurangi ketidakpastian atau kompleksitas tersebut. Pemimpin dapat berupaya untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan dan ketergantungannya yaitu melalui 1) merger atau integrasi vertikal, 2) join venture atau hubungan kerja lainnya, 3) komisaris, 4) tindakan Politik, 5) pergantian pimpinan (Pfeffer and Salancik, 1978). Sementara Davis dan Cobb (2010) menyatakan rumusan *Resources Dependence Theory* meliputi 3 aspek yaitu 1) keterkaitan dalam permasalahan sosial, 2) startegi organisasi untuk mandiri dan mencapai tujuannya, dan 3) power bagaimana tindakan organisasi terkait dalam hubungan internal dan eksternalnya.

Disamping itu adanya perbedaan saling ketergantungan juga mengakibatkan adanya perbedaan kekuatan (power) antar elemen. Menurut Richard (1989) pengaruh kekuatan yang tidak terkendali atau bila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan rusak hubungan antar elemen sebagai akibat adanya saling ketergantungan serta mendorong timbulnya perilaku mengambil keuntungan dari rekanan. Sementara itu Brown J.R., et. all. (1995), menyatakan penggunaan kekuatan perlu mendapat perhatian mengingat penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dapat menghancurkan komitmen.

METODELOGI

Studi ini bertujuan untuk melihat peran kelembagaan dalam kaitannya dengan hubungan patron klien pada masyarakat nelayan. Studi dilakukan pada 3 desa nelayan berbeda yaitu Desa Ketapang Di Bandar Lampung, Desa Wonokerto Kota Pekalongan, dan Desa Tanjung Luar Propinsi Mataram. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara pada responden terpilih di 3 wilayah tersebut. Responden pada setiap wilayah desa nelayan ditentukan dengan menggunakan metode *snow ball* yaitu

dengan menentukan terlebih dahulu secara acak responden patron yang kemudian diikuti responden para klien dari patron terpilih. Sebagai bahan pendukung, pimpinan kelembagaan desa yaitu kepala desa, ketua kopersi dan tempat pelengan ikan juga dirujuk sebagai responden studi ini. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan metode triangulasi sumber yaitu antara patron, klien dan kelembagaan (Sugiyono, 2014) (Gambar 1.)



Gambar 1. Metode Analisis Triangulasi Sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Responden

Kajian peran kelembagaan dalam hubungan patron klien dilakukan melalui wawancara dengan para nelayan pada 3 wilayah yaitu Desa Ketapang Propinsi Bandar Lampung, Desa Wonokerto Kabupaten Pekalongan serta Desa Tanjung Luar Propinsi Mataram. *Interviewee* pada studi ini terdiri dari nelayan yang memiliki hubungan patron klien serta nelayan yang tidak terikat pada hubungan tersebut. Wawancara juga dilakukan pada kepala desa serta ketua koperasi pada masing-masing desa untuk menggali peran-peran lembaga yang ada di Desa. Sebanyak 22 responden yang terdiri patron sebanyak 7, klien sebanyak 9 serta mandiri sebanyak 6 responden. Secara ringkas responden pada studi ini adalah sebagai berikut (Tabel 1.)

Tabel 1. Karakteristin Responden Penelitian

Jenis Kelamin	Pendidikan	Status			
		Juragan	Mandiri	Klien	Total
Laki-Laki	SD	1	3	2	6
	SLTA	2	0	2	4
	SMP	3	2	1	6
	Tidak Sekolah	0	1	4	5
Perempuan	SD	0	0	0	0
	SLTA	1	0	0	1
	SMP	0	0	0	0
	Tidak Sekolah	0	0	0	0
Total		7	6	9	22

Sementara itu dilihat dari kelembagaan yang berperan aktif dalam mendukung nelayan pada masing-masing desa adalah seperti pada table 2 di bawah ini. Desa Ketapang Propinsi Lampung merupakan desa dengan ketersediaan lembaga yang paling sedikit yaitu hanya didukung lembaga keuangan PNPM. Sementara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada desa tersebut sudah tidak berjalan atau beroperasi lagi. Lembaga koperasi baik koperasi desa maupun nelayan tidak ada di Desa Ketapang. Berbeda dengan Desa Wonokerto dan Tanjung Luar, pada kedua desa ini tersedia tempat pelelangan ikan dan juga koperasi yaitu koperasi nelayan. Bahkan pada awalnya Desa Tanjung Luar memiliki Koperasi Unit Desa (KUD). Namun pada saat ini KUD tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau sudah bubar.

Tabel 2. Lembaga-Lembaga Pada Desa Nelayan.

No	Lembaga	Ketapang	Pekalongan	Tanjung Luar
1	KUD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada (Sudah Bubar)
2	Koperasi Nelayan	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Tempat Pelelangan Ikan	Ada (Tidak Berjalan)	Ada	Ada
4	Lembaga Keuangan Bank dan PNPM	Ada	Ada	Ada

Perbedaan antar daerah nelayan ini juga dapat dilihat dari karakteristik nelayan pada setiap daerah. Nelayan Desa Ketapang Bandar Lampung terdiri dari nelayan kecil dengan jenis perahu payang. Alat tangkap yang digunakan berupa jaring mini traw/cantrang serta pancing. Sementara itu hasil tangkapan nelayan ketapang berupa udang, cumi dan ikan teri. Hanya sebagian kecil hasil tangkap berupa ikan-ikan seperti ikan kakap, kerapu, serta ikan sejenis lainnya. Berbeda dengan nelayan Ketapang, Nelayan Desa Wonokerto dan Tanjung Luar sangat beragam baik dari ukuran dan jenis perahu, alat tangkap, jangka waktu penangkapan serta jenis hasil tangkapan. Ukuran perahu nelayan wonokerto sangat beragam mulai dari ukuran kecil sampai ukuran perahu atau kapal lebih dari 50 gt dengan jangka waktu penangkapan lebih dari 1 bulan. Wilayah penangkapan nelayan desa Wonokerto pun sangat luas bahkan ada beberapa nelayan yang mencari ikan sampai wilayah Papua atau mendekati wilayah Negara Australia. Hasil tangkapan nelayan Wonokerto sangat beragam mulai dari ikan teri, udang robster, sampai berbagai jenis ikan karang dan laut dalam seperti tongkol, cakalang dan blue marine. Demikian pula nelayan untuk Desa Tanjung Luar, walaupun jenis perahu cenderung seragam namun aktivitas dan wilayah tangkap nelayan juga mencapai wilayah Papua dan Indonesia Timur. Berikut ini gambaran karakteristik nelayan pada 3 desa wilayah studi.

Tabel 3. Karakteristik Nelayan Antar Desa Nelayan

No	Karakteristik	Ketapang	Pekalongan	Tanjung Luar
1	Alat Tangkap	Pancing, Minitrawl	Pancing	Pancing Minitrawl
2	Jenis Tangkapan	Ikan Teri, Udang	Beragam	
3	Ukuran Perahu	Cenderung Sama	Beragam	Cenderung Sama Beragam
4	Waktu Tangkap	8-12 jam	Ada yang 8-12 jam Ada yang sampai berbulan2	8-12 jam Mingguan

Keterikatan Nelayan Dalam Hubungan Patron Klien

Mayoritas masyarakat nelayan tergolong pada masyarakat subsisten. Ketergantungan masyarakat pada pemilik modal menjadi bagian dari perilaku masyarakat nelayan. Ketergantungan yang besar masyarakat nelayan pada sumberdaya laut baik berupa ketersediaan, kondisi alam berupa cuaca serta letak dan mobilitas sumberdaya ikan mengakibatkan pendapatan nelayan begitu berfluktuasi. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari dukungan sumberdaya lain yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ketika mereka tidak dapat bekerja atau pendapatan mereka tidak mencukupi. Pada sisi lain sebagian besar masyarakat nelayan bukan merupakan pemilik kapal dan alat tangkap sendiri. Pemilik kapal pada umumnya adalah para pemilik modal yang dapat disebut bermacam-macam berbeda-beda antar desa nelayan. Untuk Desa Ketapang disebut Pembina sementara di Desa Wonokerto Pekalongan disebut Pelanggan dan di Desa Tanjung Luar di sebut

Adanya alternatif sumber pembiayaan tidak menghilangkan ketergantungan masyarakat nelayan terhadap pemilik modal. Pada wilayah masyarakat nelayan akan sangat mudah ditemui lembaga-lembaga keuangan informal yang menawarkan pinjaman pada masyarakat. Pada Desa Tanjung Luar, Mataram masyarakat menyebutnya Bank Rontok/Dobrak. Demikian pula di Desa Ketapang banyak penawaran bentuk pinjaman seperti ini dan dikelola oleh etnik tertentu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Kepala Koperasi Nelayan Sumber Jala Desa Tanjung Luar berikut ini.

“Namun demikian masih saja ada anggota koperasi yang terlilit atau terjerat oleh bank rontok. Agak sulit koperasi memutus rantai tersebut karena ini sudah menjadi bagian budaya sekelompok nelayan. Walaupun kami telah menyediakan pinjaman atau skema tanpa anggunan.”

Disamping modal, keterikatan klien pada patron juga disebabkan oleh rantai distribusi dari hasil tangkapan mereka. Misalnya untuk Desa Ketapang penjualan kepiting dan udang dibawah binaan bapak Ujang sementara untuk teri ada dibawah binaan bapak Junaidi. Kondisi seperti ini terjadi juga di Desa Wonokerto, untuk teri ada Ibu Yanti (Juragan/Pelanggan) dan Bapak Dalas (Juragan/Pelanggan) untuk ikan kakap, kerapu dan udang, sementara untuk ikan-ikan kecil yang dijadikan tepung ikan dijual kepada pelanggan/juragan yang khusus menerima ikan tersebut. Keterikatan ini juga dikaitkan antara hubungan Pembina dengan pedagang besar atau rantai distribusi selanjutnya (Lihat Gambar 3.). Untuk itu Pembina harus memiliki ketrampilan khusus atau kompetensi tertentu yang meningkatkan keterikatan klien pada mereka. Misalnya Pak Ujang dengan kemampuannya untuk mensortir kepiting pada tiap tingkat harga akan meningkatkan total penjualan kepiting dibandingkan bila dijual tanpa disortir terlebih dahulu. Demikian pula untuk ikan teri, kemampuan Ibu Yanti dalam mengemas menjadi ikan teri kering serta Pak Junaidi menjadi ikan teri asin memberi kekuatan pada pihak Patron dalam memberikan harga penawaran yang lebih baik. Berikut pernyataan pihak Pembina terkait hubungannya dengan klien.

“Saya tidak memaksa mereka untuk bekerja dengan saya, karena mereka mau mencari kepiting maka saya beri mereka modal”

“kan kalau kepiting itu ada ukurannya pak. Nah Ujang ini yang bisa nyortir-nyortir itu. Kalau saya mah entar bingung”

“iya. kalau sini kan ngikut. Artinya disana khusus kepiting, berarti jualnya kesana. Berarti saya yang jualnya, gitu pak. Ada orang 3 (tiga) si pak disini. Cuma, mereka beda harganya. Kalau mereka 25 (dua puluh lima) saya 30 (tiga puluh ribu) belinya”

Keterikatan klien pada Patron juga disebabkan oleh keterikatan hubungan hutang budi. Kendala cuaca dan tidak adanya simpanan kerap kali mengakibatkan klien kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut ini pernyataan nelayan dan ketua koperasi sumberjala berikut ini sehubungan dengan pembiayaan kehidupan nelayan sehari-hari.

“Koperasi nelayan sumberjala yang didirikan 28 Oktober tahun 2008. Alasan berdirinya koperasi adalah kesulitan nelayan dalam mencari modal. Tahun 2008 sangat berbeda dengan kondisi saat ini dimana banyak berdiri lembaga keuangan seperti bank dan modal ventura”

“Kalo sekarang ini, kadang satu bulan sukur-sukur ada 15 (lima belas) hari. Kadang baru dapat 2 (dua) hari, besok udah lain lagi”

“Ya karena mereka kan yang termasuk hidupnya tergantung dengan kita. Seumpama hari ini dia mau ditangkap, berangkat melaut. Biaya operasi melaut itu merek peroleh dari kita. Kalo hari ini dia dapat kan bisa langsung kita potong, kalau kosong ya catetan dulu”

Kondisi seperti ini mengakibatkan nelayan semakin terikat dengan pihak patron. Hutang budi berupa bantuan pada saat cuaca buruk atau ketika hasil melaut tidak mencukupi mengakibatkan nelayan sulit keluar dari hubungan patron klien. Hal ini ditunjukkan dari hubungan patron klien yang memiliki durasi lama bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Pergantian patron dari sisi nelayan dapat terjadi ketika nelayan beralih profesi atau ketika patron sudah tidak mampu mebiayai kliennya. Perilaku ini yang disebut dalam Marzali (1993) *safety first* yaitu mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari terlebih dahulu. Sementara Wolf (1985) menyebutnya *Strategi Defensif* yaitu ketika mengalami tekanan yang dapat mempengaruhi hidupnya kaum subsisten mengatasinya dengan cara melakukan pinjaman, sewa, atau meminta bantuan dari rumah tangga lainnya.

Pada sisi lain dalam hubungan patron klien ketergantungan tidak hanya terjadi pada klien terhadap patron, tetapi ketergantungan atau keterikatan juga terjadi dari patron terhadap klien. Ketergantungan patron kepada klien ini disebabkan adanya pola hubungan yang bertingkat dalam hubungan patron klien ini. Peran klien tidak hanya terjadi pada nelayan tetapi juga ada pada juragan terhadap pedagang besar atau eksportir yaitu berdasarkan hubungan distribusi hasil tangkap (lihat Gambar 3). Untuk dapat memenuhi “kewajiban” juragan/pengumpul kepada pedangan besar, juragan/pengumpul memerlukan klien yang ada dalam binaannya untuk tetap setia. Dalam upaya mempertahankan hubungan ini dari sisi patron, maka patron berupaya untuk memenuhi keperluan kliennya. Salah satu bentuk upaya patron mempertahankan kliennya adalah menjaga hubungan kedekatan dengan

cara memberi perlakuan khusus pada kliennya seperti memberi rokok, mengunjungi rumah klien dengan membawa hadiah dan lainnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keterikatan hubungan patron klien adalah akses pasar. Keterikatan nelayan pada Desa Ketapang dalam hubungan patron klien dapat dipandang lebih besar dari pada kedua desa lainnya. Pada Desa Wonokerto dan Tanjung Luar akses nelayan terhadap pasar sangat terbuka yaitu dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI). Namun demikian waktu pelelangan ikan yang tidak sesuai dengan kondisi nelayanpun dapat mengakibatkan nelayan terkendala dalam mengakses TPI ini. Ketika TPI baru dimulai pukul 13-15 siang untuk nelayan yang harus melaut pada pukul 4 sore serta mendarat pada pukul 7-10 pagi kondisi ini tidak memungkinkan mereka untuk menjual tangkapannya ke TPI. Menurut Popkins (1979) salah satu bentuk keterikatan pada hubungan patron-klien sebagai akibat keterbatasan akses klien terhadap pasar baik atas tindakan pihak patron ataupun disebabkan kondisi alami dari lingkungan masyarakat. Adanya keterbatasan akses terhadap pasar atau sumberdaya mendorong tumbuhnya ketergantungan pada pihak yang mempunyai akses tersebut. Strategi untuk memperoleh akses ini salah satunya adalah menjalin kerjasama atau kolaborasi (Pfeffer and Salancik, 1978; Davis dan Cobb, 2010). Namun ketika ada perbedaan kekuatan antar pihak-pihak yang bekerjasama maka hubungan kerjasama ini dapat berupa hubungan antara patron dan klien (Scott, 1981).

Konsekuensi dari keterikatan nelayan dalam hubungan patron klien berupa kemudahan-kemudahan klien dalam memperoleh bantuan biaya hidup, modal kerja dan akses terhadap pasar adalah berupa kewajiban klien untuk menjual hasil tangkapnya kepada pihak patron. Kewajiban ini merupakan bentuk balas budi dari klien kepada patron walaupun secara ekonomi hutang klien tetap diperhitungkan. Secara sederhana gambaran pola hubungan patron klien berikut kewajiban dari masing-masing pihak dapat dilihat pada gambar di bawah ini



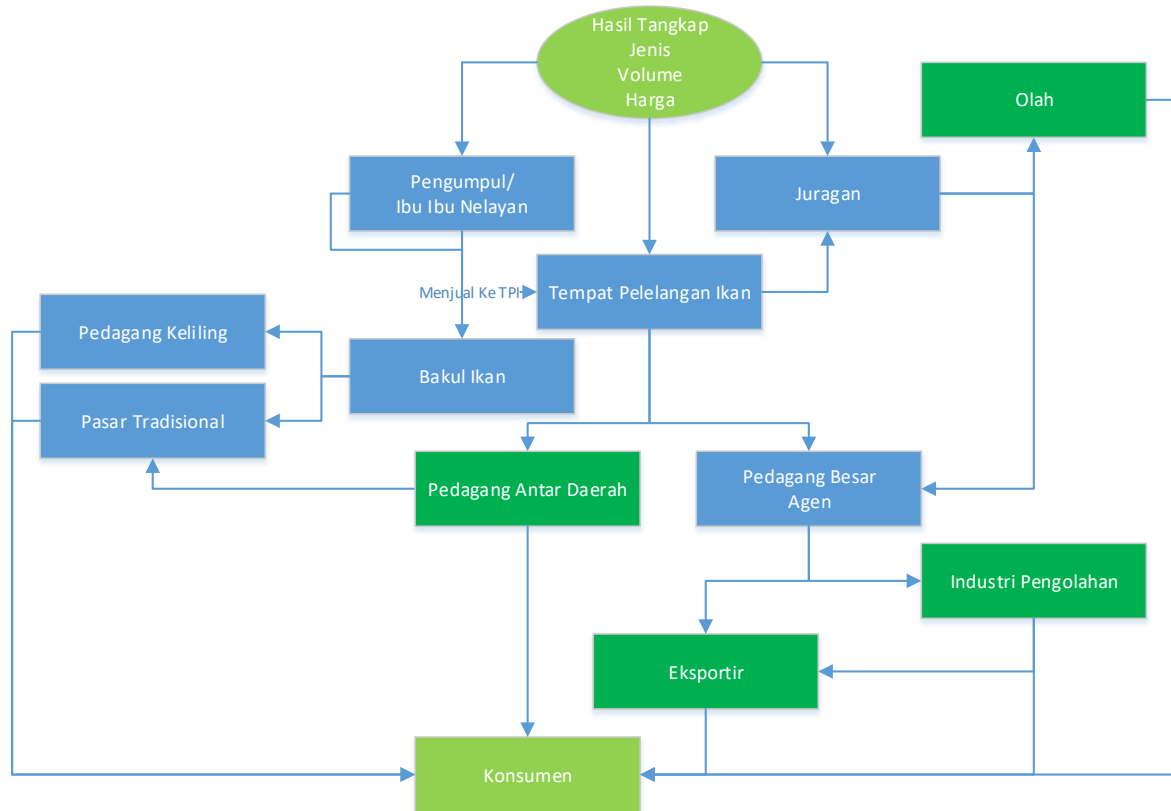
Gambar 2. Keterikatan Nelayan Dalam Hubungan Patron Klien

Peran Kelembagaan Pada Masyarakat Nelayan

Terpuruknya masyarakat nelayan dalam hubungan Patron Klien kerap kali dijadikan alasan mengapa kehidupan ekonomi nelayan tetap tidak dapat keluar dari golongan keluarga miskin. Dominasi patron dalam hubungan patron klien apakah mendorong patron melakukan praktek monopoli dengan membeli harga murah terhadap hasil tangkapan klien. Hubungan kerja serta pembagian hasil antara juragan dan nelayan bukan hanya didasari pada aspek sosial semata melainkan juga didasari pada aspek ekonomi dan juga aspek ketergantungan, namun dengan posisi tawar menawar bagi klien yang tidak berimbang. Hasil observasi dan wawancara menggambarkan hal yang berbeda. Walaupun hubungan patron klien baik di Ketapang, Wonokerto maupun Tanjung Luar menunjukkan hubungan patron klien yang telah berlangsung lama. Namun dari keamatan hubungan patron klien pada masyarakat nelayan tidaklah kuat. Keberadaan patron yang cukup banyak disuatu daerah bisa menjadi alternatif bagi klien untuk berganti patron. Klien memiliki banyak alasan menentukan patronnya, seperti lokasi dimana kapal ditambat atau mendarat juga disamping keamatan hubungan kekeluargaan antara patron dan klien serta antara klien sendiri. Namun hal utama yang menjadi ukuran bertahannya klien dengan patron adalah harga beli patron atau pembagian hasil. Seperti yang disampaikan nelayan berikut ini.

- T: Disamping memilih pak Ujang apakah mereka bisa ke pak Zainudin misal. Atan ukah ada hal lain yang lebih yang bapak berikan?
- J: Ya pas ngasih modalnya gitu pak
- T: Iya, misal saya juga mau ngasih modal. Berarti bisa dong ke saya engga ke pak Ujang?
- J: Ya ada juga yang seperti itu

Secara umum pola penentuan harga beli di Desa Wonokerto dan Tanjung Luar adalah berdasarkan harga yang terbentuk dari jual beli di TPI. Pada Desa Ketapang penentuan harga lebih ditentukan oleh pedagang besar hal ini disebabkan TPI yang ada di desa tersebut sudah tidak berfungsi (lihat Gambar 3.). Ketentuan harga baik yang ditetapkan oleh pedagang besar atau TPI berlaku untuk semua patron dan diketahui oleh semua klien. Adanya perbedaan harga antar patron akan mendorong klien berpindah patron. Kondisi ini seperti yang dinyatakan Richard (1989) perilaku patron dalam menetapkan harga beli secara sepihak dapat merusak menghancurkan komitmen hubungan patron klien dengan hancurnya komitmen antara keduanya Brown J.R., et. all. (1995). Peran peting lain dari TPI selain sebagai penentu harga adalah menjadi sebagai lembaga keuangan. TPI di Desa Wonokerto bekerja sama dengan koperasi diberi kewenangan untuk memotong hutang dari anggota koperasi. Disamping itu pola retribusi yang diterapkan TPI dapat menjadi alternative nelayan menyimpan uang. Dari 6% biaya retribusi sebesar 2% akan dikembalikan kepada nelayan atau pembeli.



Gambar 3. Rantai Distribusi Hasil Tangkapan Nelayan

Disamping penentuan harga, pembagian hasil antara patron dan klien di tiga desa pengamatan juga memiliki pola yang sama. Pola bagi hasil untuk Desa ketapang adalah pola 13 atau 10. Pola ini diterapkan juga pada Desa Wonokerto dan Tanjung Luar. Pola 13 maksudnya adalah hasil penangkapan setelah dikurangi modal selanjutnya di bagi 13. Empat bagian menjadi pemilik kapal dan alat tangkap serta 8 bagian untuk kapten dan anak buah kapal (ABK). Sementara 1 bagian menjadi insentif bagi yang bekerja lebih keras atau rajin selama bekerja. Pemilik kapal akan mendapat tambahan bagian bila peralatan yang digunakan adalah berasal dari mereka. Pada kondisi tertentu dimana semua peralatan dan modal dari pemilik kapal maka pola bagi hasil adalah 50:50. Pada kondisi seperti ini peran koperasi menjadi lebih penting mengingat koperasi menawarkan pola bagi hasil 60:40 bagi koperasi pada kondisi yang sama.

Peran penting koperasi lainnya adalah sebagai pemberi pinjaman baik untuk biaya modal ataupun keperluan hidup. Kemampuan koperasi dalam memberikan simpanan pada anggota dan luar anggota akan mengurangi ketergantungan masyarakat nelayan pada hubungan patron klien. Hal ini ditunjukkan dari terus meningkatnya anggota koperasi yang semula berjumlah 20 pada tahun 2008 menjadi 225 pada tahun 2015. Salah satu kisah sukses koperasi adalah membantu anggota yang pada awalnya hanya memiliki mesin ketinting dan tidak punya jaring dengan bantuan pinjaman koperasi selama 15 bulan nelayan mampu membeli mesin Yamaha 15 PK banyak kisah-kisah seperti ini (Ketua Koperasi Tanjung Luar). Sementara itu disamping memberi pinjaman, koperasi di Desa Wonokerto juga mengelola penyediaan bahan bakar solar bagi nelayan.

KESIMPULAN

- Keterikatan hubungan patron klien pada masyarakat nelayan sangat ditentukan oleh peran kelembagaan pada wilayah tersebut. Keberadaan kelembagaan baik berupa koperasi, TPI akan membuka akses semakin luas bagi masyarakat nelayan untuk memperoleh sumberdaya maupun akses terhadap pasar.
- Keberadaan lembaga koperasi dan TPI mendorong keeratn hubungan patron klien semakin lemah. Ketersedian sumberdaya alternative serta keterbukaan informasi memberikan daya tawar klien terhadap patron lebih kuat.
- Waktu operasi dan ketersediaan modal kerja menjadi kendala bagi lembaga untuk dapat mengurangi keterikatan masyarakat dalam hubungan patron klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, PHS. 1996. *Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Kondisi pada Akhir Abad 19*. Prisma 6:29-45
- Blau, P.M. 1964. *Exchang Power in Social Life*. New Yor: Wiley
- Brown J.R., et all. 1995. Power and Relationship Commitment: Their Impact on Marketing Channel Member Performance. *Journal of Retailing*, 71 (4). P393-392.
- Dahuri R dan Anas P. 2012. Rekonstruksi Manajemen Perikanan Tangkap. *Koran Seputar Indonesia. Jumat 31 Agustus 2012*. Hal. 9
- Davis G.F. dan Cobb J. A. 2010. Resource dependence theory: Past and future.” *Research in the Sociology of Organizations*. 28: 21-42
- FAO. 2011. Review of the State of World Marine Fishery Resources. *FAO Fisheries And Aquaculture Technical Paper*. Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Rome, 2011
- FAO. 2012. FAO-Fishery and Aquaculture Global Statistics. [.http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production](http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production).
- Gouldner A.W. 1960. The Norm Of Reciprocity A Plinary Statement. *American Sociology Review*. Vol. 25. No 2
- Hingley. 2005. Power Imbalance Relationship: Chase from UK Fresh Food Supply. *International Journal of Retail and Distribution Management*. 33 (8). P. 551-569.
- Kausar dan Zaman, K. 2011. Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke Dan Petani Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). *Indonesian Journal of Agricultural Economics*. V.2. No. 2
- Marzali, Amri, 1993. “Beberapa Pendekatan dalam Kajian tentang Respon Petani Terhadap Tekanan Penduduk di Jawa”. Dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (JIIS), No.4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana A. 2014. Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Kapedai Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal SI Sosiologi*. Vol. 3. No. 2.
- Mavondo, F.T. dan Rodrigo, E.M 2001. The effect of relationship dimensions on interpersonal and interorganizational commitment in organizations conducting business between Australia and China. *Journal of Business Research*, 52, P. 111-121.
- Pfeffer, J. and Salancik, G.R. 1978. *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. New York. Harper and Row
- Popkin, Samuel, 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press

- Priyatna F.N. dan Sumartono. 2011. Pola Pemanfaatan Sumber Daya, Subsistensi Dan Pola Hubungan Patron-Klien Masyarakat Nelayan Danau Tempe, Sulawesi Selatan. *Jurnal Matematika, Saint dan Teknologi*, V. 12, No. 1, P. 37-45
- Richard G. N . 1989. Single Sourcing: Short-Term Saving Versus Long Term Problems. *Journal of Purchasing and Materials Management*. 25. No 2. 20-25
- Rustinsyah. 2011. "Hubungan patronklien di kalangan petani Desa Kebonrejo" Volume 24 (2): 176-182.
- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New haven: Yale University
- . 1972. Patron-client politics and political change in Southeast Asia. 66 (1):91-113
- . 1993. *Perlawanan Kaum Tani. Diterjemahkan oleh Budi Kusworo, et al.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- Usman, S. 2004. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. *Center for Indonesian Research and Development (CIReD)*. Yogyakarta
- Waswo, A. 1977. *Japanese Landlords: The Decline of a Rural Elite*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Wolf, E. R., 1985. Petani: Suatu Tinjauan Antropologis. Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu- ilmu Sosial (YIIS). Jakarta: CV Rajawali.